BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

(Sari, 2020) Meneliti tentang Pengaruh Regulasi Pemerintah terhadap Akses Pembiayaan Usaha Mikro yang dilaksanakan di Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana regulasi pemerintah dan prosedur perizinan usaha mempengaruhi akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Dengan hasil penelitian regulasi pemerintah yang jelas, transparan, dan prosedur perizinan sederhana terbukti meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro di Surabaya. Regulasi yang rumit menjadi hambatan utama bagi pengusaha kecil. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif, perbedaan penelitian sebelumnya dari penelitian sekarang yaitu lokasi penelitian dilaksakan di kota Surabaya.

(Rahman dan Lestari, 2021) Meneliti tentang Hambatan UKM dalam Mengakses Kredit Perbankan diKota Bandung. Tujuan penelitianan ini untuk Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam akses kredit perbankan oleh UMKM. Dengan hasil penelitian ditemukan bahwa persyaratan jaminan yang tinggi, suku bunga yang tinggi, serta rendahnya literasi keuangan merupakan hambatan utama dalam memperoleh pinjaman bank. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif, perbedaan penelitian sebelumnya dari penelitian sekarang yaitu lokasi penelitian dilaksanakan dikota Bandung.

Pengaruh lingkungan regulasi terhadap perkembangan UKM di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana lingkungan regulasi yang meliputi perizinan, persyaratan administrasi, serta konsistensi kebijakan pemerintah mempengaruhi perkembangan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) di Indonesia (Pratama, 2019). Dengan hasil menunjukkan bahwa lingkungan regulasi memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan UKM. Regulasi yang tidak konsisten, sering berubah, dan memiliki prosedur administratif yang rumit terbukti menghambat efektivitas operasional UKM. Sebaliknya, regulasi yang jelas, stabil, dan sederhana meningkatkan kepastian usaha serta mempermudah pelaku UKM dalam mengurus legalitas dan mengakses layanan keuangan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif, perbedaan penelitian sebelumnya dari penelitian sekarang yaitu lokasi penelitian

(Putri, 2019) Meneliti tentang Pengaruh Ketersediaan Jaminan terhadap Kemudahan Akses Kredit UKM di Kota Bandung. Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis apakah keberadaan jaminan berperan penting dalam proses persetujuan kredit bagi pelaku UKM. Dengan hasil menunjukan bahwa Ketersediaan jaminan terbukti menjadi faktor dominan dalam keputusan bank memberikan kredit.

(Hidayat, 2022) Meneliti tentang Persepsi Pelaku UKM terhadap Suku Bunga Kredit di Masa Pandemi di Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui persepsi pelaku UKM terhadap tingkat suku bunga selama masa pandemi dan dampaknya terhadap akses pembiayaan. Dengan hasil Tingginya

suku bunga membuat pelaku UKM menunda atau menghindari pengajuan pinjaman, sehingga minat mengakses pembiayaan menurun signifikan selama pandemi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif, perbedaan penelitian sebelumnya dari penelitian sekarang yaitu lokasi penelitian dilaksanakan di Yokyakarta.

(Ningsih, T.W. 2022) Meneliti tentang Menggali Tantangan yang dihadapi UKM Indonesia dalam Mengakses Layanan Keuangan. Tujuan penelitian ini untuk Menelaah tantangan nasional UKM dalam mengakses pembiayaan formal. Dengan hasil ditemukan bahwa regulasi kompleks, suku bunga tinggi, dan kurangnya aset jaminan menjadi hambatan terbesar. Diperlukan reformasi kebijakan inklusi keuangan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif, perbedaan penelitian sebelumnya dari penelitian sekarang yaitu lokasi penelitian.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian sekarang. Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaan yaitu waktu penelitian: penelitian terdahulu mungkin telah dilakukan pada periode waktu tertentu di masa lalu, sedangkan penelitian baru akan memfokuskan pada periode waktu yang berbeda.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Lingkungan Regulasi

Lingkungan regulasi adalah keseluruhan aturan, kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga berwenang untuk mengatur aktivitas ekonomi dan operasional suatu sektor usaha. Lingkungan regulasi mencakup peraturan perizinan, standar kepatuhan, kewajiban administratif, serta ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Lingkungan regulasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami dapat menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi, serta mendukung perkembangan usaha, termasuk dalam akses pelaku UKM terhadap layanan keuangan. Sebaliknya, regulasi yang rumit atau tidak stabil dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan keterjangkauan layanan tersebut.

Berdasarkan temuan (Ningsi, 2023), lingkungan regulasi merupakan seperangkat aturan, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM). Regulasi yang kondusif dapat menciptakan iklim usaha yang stabil, transparan, dan adil, sehingga mempermudah UKM dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Sedangkan menurut (Pratiwi, 2020), regulasi yang rumit, biaya administrasi tinggi, dan proses perizinan yang panjang menjadi hambatan utama bagi UKM dalam mengakses layanan keuangan. Oleh karena itu, regulasi yang sederhana, transparan, dan mendukung sektor UKM sangat berpengaruh terhadap meningkatnya akses ke layanan keuangan.

Lingkungan regulasi yang baik juga mencakup keberadaan sistem hukum yang menjamin keamanan kontrak, perlindungan hak kepemilikan, dan kepastian dalam penegakan hukum. Bank Indonesia (2020) menegaskan bahwa keterbukaan informasi, kemudahan perizinan, dan transparansi lembaga keuangan merupakan aspek penting dalam memperkuat kepercayaan UKM terhadap sistem keuangan. Dengan demikian, regulasi yang stabil dan berpihak pada UKM dapat meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam sektor formal dan memperluas jangkauan layanan keuangan. Institusi formal seperti hukum dan regulasi memengaruhi perilaku ekonomi dengan cara mengurangi ketidakpastian dalam interaksi ekonomi. Regulasi yang jelas dan konsisten akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan lembaga keuangan. Dalam konteks UKM, regulasi yang sederhana dan transparan mempermudah pemenuhan persyaratan pembiayaan, seperti perizinan usaha dan legalitas administrasi (North, 1990).

Penelitian oleh (Beck, Demirguc Kunt, dan Maksimovic 2006) menemukan bahwa kualitas institusi dan regulasi berpengaruh signifikan terhadap akses pembiayaan UKM. Negara dengan regulasi yang lebih baik cenderung memiliki tingkat akses kredit UKM yang lebih tinggi. laporan (World Bank, 2015) menyatakan bahwa penyederhanaan regulasi dan prosedur administrasi pembiayaan dapat meningkatkan partisipasi UKM dalam sistem keuangan formal. Regulasi yang mendukung UKM mampu menurunkan risiko kredit dan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan. Penelitian (Gilaninia, 2023) juga menunjukkan bahwa lingkungan regulasi yang kondusif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UKM melalui peningkatan akses pembiayaan. Temuan ini

memperkuat bahwa regulasi berperan penting dalam meningkatkan akses layanan keuangan UKM.

2.2.2 Faktor-faktor utama yang mempengaruhi lingkungan regulasi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan regulasi, antara lain:

1. Faktor Internal*(domestik)*

Lingkungan regulasi dipengaruhi oleh berbagai faktor internal *(domestik)*, khususnya yang berkaitan dengan:

a. Politik dan pemerintah

Ideologi politik dari partai atau pemerintah yang sedang berkuasa sangat menentukan arah regulasi, karena partai konservatif cenderung mendorong kebijakan deregulasi, sementara partai yang lebih progresif biasanya mendukung regulasi sosial dan ekonomi yang lebih kuat. Selain itu, struktur pemerintahan seperti sistem presidensial, parlementer, federal, atau unitaris juga memengaruhi bagaimana regulasi dibuat dan ditegakkan, karena setiap struktur memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Faktor lainnya adalah tekanan kelompok kepentingan (lobi), di mana kelompok bisnis, serikat pekerja, organisasi nirlaba, dan asosiasi industri aktif melobi pemerintah untuk membuat regulasi yang menguntungkan mereka atau menolak regulasi yang dianggap merugikan. Tidak kalah penting, opini publik turut membentuk lingkungan regulasi, karena perubahan sentimen masyarakat terhadap isu tertentu seperti perlindungan lingkungan, keamanan produk, atau privasi data dapat

mendorong pemerintah untuk merumuskan atau memperbarui regulasi guna merespons tuntutan publik tersebut.

b. Ekonomi

Lingkungan regulasi juga dibentuk oleh kondisi ekonomi, sosial, dan perkembangan teknologi di dalam negeri. Dari aspek ekonomi, situasi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, stabilitas pasar, hingga kebutuhan investasi dapat mendorong pemerintah menyesuaikan kebijakan regulasi untuk menjaga stabilitas dan menarik kegiatan usaha. Pada saat kondisi ekonomi kurang stabil, regulasi cenderung diperketat untuk mengurangi risiko, sedangkan pada masa pertumbuhan, regulasi dapat dibuat lebih fleksibel untuk mendorong aktivitas usaha.

c. Sosial dan Budaya

Dari sisi sosial, perubahan perilaku masyarakat, tingkat pendidikan, nilai-nilai sosial, dan kebutuhan publik juga memengaruhi arah regulasi, terutama regulasi yang menyangkut perlindungan konsumen, keamanan, dan kesejahteraan sosial.

d. Teknologi

kemajuan teknologi menjadi faktor yang semakin penting, karena perkembangan digitalisasi, e-commerce, fintech, dan inovasi teknologi baru menuntut pemerintah untuk memperbarui regulasi agar tetap relevan, mencegah risiko penyalahgunaan, dan mendukung perkembangan industri

modern. Ketiga faktor ini bekerja secara bersamaan dan berkontribusi signifikan dalam membentuk dinamika lingkungan regulasi nasional.

2. Faktor Eksternal*(Internasional/Global)*

Selain dipengaruhi oleh faktor internal, lingkungan regulasi juga dibentuk oleh faktor eksternal yang bersumber dari dinamika global. Globalisasi ekonomi menjadi salah satu faktor utama, karena keterlibatan negara dalam perdagangan internasional, arus investasi asing, dan integrasi pasar global mendorong pemerintah untuk menyesuaikan regulasi agar sejalan dengan standar internasional dan mampu menjaga daya saing nasional. Tidak hanya itu, tekanan lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, WTO, dan organisasi regional juga memengaruhi penyusunan kebijakan, terutama terkait transparansi, perlindungan investor, serta stabilitas sektor keuangan. Perkembangan teknologi global memaksa negara untuk menyesuaikan regulasi agar dapat mengikuti perubahan cepat dalam inovasi digital, keamanan data, dan perdagangan elektronik lintas negara. Di sisi lain, perjanjian internasional dan komitmen bilateral maupun multilateral menuntut negara untuk menyelaraskan regulasi domestik dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Seluruh faktor eksternal tersebut memberikan tekanan sekaligus peluang bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi yang relevan, modern, dan mampu menjawab tantangan global.

2.2.3 Indikator Lingkungan Regulasi

Lingkungan regulasi dalam penelitian ini diukur melalui beberapa indikator yang telah digunakan pada penelitian terdahulu. (Eva Utami, 2020) menekankan bahwa kejelasan regulasi merupakan aspek penting, di mana aturan pemerintah harus tersusun secara jelas, mudah dipahami, serta tidak menimbulkan interpretasi ganda bagi pelaku UKM. Kemudahan perizinan merupakan bagian dari lingkungan regulasi yang baik, ditandai dengan akses perizinan yang mudah, layanan perizinan yang mendukung, serta fasilitas pemerintah yang membantu proses pengajuan pembiayaan. Selain itu, (Rahman dan Lestari, 2021) serta (Pratama, 2019) menunjukkan bahwa kesederhanaan prosedur administrasi juga menjadi indikator utama, yang terlihat dari tidak berbelit-belitnya persyaratan dokumen, kemudahan pemenuhan syarat, dan efisiensi proses pengajuan kredit. Dukungan kebijakan pemerintah, seperti program pembiayaan UKM, pendampingan, serta kebijakan yang membantu mengurangi hambatan akses kredit, juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas lingkungan regulasi. Di sisi lain, (Pratama, 2019) menyoroti pentingnya konsistensi dan kepastian regulasi, di mana kebijakan harus diterapkan secara stabil, tidak mengalami perubahan mendadak, serta memberikan kepastian hukum bagi UKM. Selain itu kemudahan perizinan usaha menggambarkan tingkat kemudahan UKM dalam mengurus legalitas dan izin usaha tanpa prosedur yang rumit (Gilaninia, 2023). Kejelasan aturan dan kebijakan menunjukkan sejauh mana pelaku UKM memahami regulasi yang berlaku terkait usaha dan pembiayaan (North, 1990)

2.2.4 Ketersediaan Jaminan

Ketersediaan jaminan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi akses pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terhadap layanan keuangan. Jaminan atau agunan merupakan aset yang dijadikan sebagai bentuk penanggungan risiko bagi lembaga keuangan apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pembayarannya. Menurut Bank Indonesia (2015), jaminan berfungsi sebagai alat pengaman bagi pihak pemberi pinjaman dalam mengurangi potensi kerugian yang timbul akibat kredit macet. Oleh karena itu, lembaga keuangan pada umumnya mensyaratkan adanya aset berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, maupun aset tidak berwujud seperti surat berharga dan piutang usaha sebagai bentuk jaminan. Penelitian oleh (Beck et al. 2006) menunjukkan bahwa persyaratan jaminan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan UKM dalam memperoleh kredit. UKM yang tidak memiliki jaminan cenderung mengalami keterbatasan akses pembiayaan. Penelitian (Noorali dan Gilaninia, 2023) juga menemukan bahwa persyaratan agunan yang tinggi menjadi hambatan utama akses pembiayaan eksternal bagi UKM. Hal ini menyebabkan banyak pelaku UKM bergantung pada modal sendiri atau sumber pembiayaan informal.

Ketersediaan jaminan yang memadai akan meningkatkan peluang UKM untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Sebaliknya, keterbatasan aset yang dapat dijaminkan seringkali menjadi hambatan utama bagi pelaku UKM dalam memperoleh pinjaman, karena lembaga keuangan menilai adanya risiko tinggi terhadap kemampuan pengembalian dana. Hal ini sejalan dengan pendapat (Ningsi, 2023) yang menyatakan bahwa banyak UKM di

Indonesia mengalami kesulitan memperoleh kredit bank akibat tidak memiliki agunan yang cukup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan jaminan memiliki peran strategis dalam menentukan sejauh mana UKM dapat mengakses layanan keuangan secara optimal. Selain itu, (World Bank, 2015) menegaskan bahwa reformasi kebijakan jaminan dapat meningkatkan akses kredit UKM, terutama bagi usaha kecil yang memiliki keterbatasan aset.

Jaminan *(collateral)* merupakan aset yang diserahkan debitur kepada kreditur untuk menjamin pinjaman yang diterima. Lembaga keuangan memerlukan jaminan sebagai bentuk pengamanan terhadap risiko gagal bayar (Kuncoro, 2020). Penelitian oleh (Prabowo, 2021) juga menunjukkan bahwa banyak UKM yang kesulitan mengakses kredit karena tidak memiliki aset tetap yang dapat dijadikan agunan. Oleh sebab itu, semakin baik kemampuan UKM dalam menyediakan jaminan, semakin besar peluang mereka mendapatkan pembiayaan. Peran dan fungsi Ketersediaan Jaminan

a. Peran ketersediaan jaminan

   Ketersediaan jaminan memiliki peran strategis dalam proses pembiayan dan pemberian kredit. Perannya tidak hanya sebagai syarat administrasi, tetapi juga sebagai alat kepercayaan dan kelayaakan bagi lembaga keuangan.

b. Fungsi Ketersediaan Jaminan

   Ketersediaan jaminan memiliki fungsi penting dalam proses pengajuan pembiayaan oleh pelaku UKM. Jaminan berperan sebagai alat pengaman bagi lembaga keuangan untuk meminimalkan risiko gagal bayar, karena

aset yang dijaminkan dapat dijadikan sumber pelunasan apabila terjadi wanprestasi. Keberadaan jaminan juga meningkatkan kepercayaan pihak pemberi kredit, sehingga peluang UKM untuk memperoleh akses layanan keuangan menjadi lebih besar. Dengan demikian, semakin memadai jaminan yang dimiliki debitur, semakin tinggi pula kemungkinan lembaga keuangan menyetujui permohonan pembiayaan.

2.2.5 Indikator Ketersediaan Jaminan

Ketersediaan jaminan dalam penelitian ini diukur melalui beberapa indikator yang merujuk pada penelitian terdahulu. Salah satu indikator penting adalah nilai jaminan yang memadai, di mana UKM harus memiliki aset dengan nilai yang cukup untuk memenuhi persyaratan agunan yang ditetapkan lembaga keuangan, sebagaimana dijelaskan oleh (Pratama, 2019) dan (Yusuf, 2019). Selain itu, kepemilikan aset yang legal juga menjadi indikator utama, yang menilai apakah aset yang dimiliki pelaku usaha memiliki dokumen kepemilikan yang jelas dan sah, sesuai dengan temuan (Colin dan Sean, 2021). (Eva Utami, 2020) dan (Wijayanti, 2018) juga menunjukkan bahwa kemudahan UKM dalam menyediakan jaminan merupakan faktor penting yang menjelaskan sejauh mana pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan agunan tanpa hambatan yang besar. Indikator lainnya adalah kecocokan jaminan dengan kriteria lembaga keuangan, yaitu kesesuaian jenis dan kondisi aset dengan standar penilaian lembaga pembiayaan, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian (Pratama, 2019). Terakhir, tingkat likuiditas aset jaminan juga menjadi perhatian, di mana aset yang mudah dijual dan memiliki nilai pasar stabil dianggap lebih ideal, seperti

dijelaskan dalam penelitian (Yusuf, 2019). Seluruh indikator ini menggambarkan bagaimana ketersediaan jaminan memengaruhi kemampuan UKM dalam mengakses layanan keuangan.

2.2.6 Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga adalah persentase imbalan atau biaya yang dikenakan atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu, baik oleh pihak pemberi pinjaman (bank) maupun penerima pinjaman (debitur). Suku bunga merupakan "harga dari penggunaan dana atau modal" artinya, bunga adalah kompensasi yang diterima oleh pemilik dana karena menunda konsumsi saat ini untuk penggunaan di masa depan, (Boediono, (2017). Suku bunga adalah harga yang dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dana dalam jangka waktu tertentu. Suku bunga menjadi faktor penting dalam keputusan meminjam karena memengaruhi besar kecilnya biaya pinjaman, (Boediono, 2018). Suku bunga yang tinggi membuat UKM enggan mengajukan pinjaman karena meningkatnya beban bunga. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, maka minat UKM untuk meminjam akan meningkat, (Dewi & Pratama, 2020).

Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), tingkat suku bunga memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan mereka dalam mengakses layanan keuangan.

a. Jika suku bunga tinggi, maka biaya pinjaman meningkat, dan banyak UKM menjadi enggan atau tidak mampu meminjam dana.

b. Sebaliknya, suku bunga rendah akan mendorong UKM untuk lebih aktif memanfaatkan pembiayaan formal, karena beban cicilan lebih ringan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Suku Bunga

1. Kebijakan Moneter Bank Indonesia

   Bank Indonesia (BI) berperan besar dalam menentukan arah pergerakan suku bunga melalui BI Rate atau BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR).

   Ketika BI menaikkan suku bunga acuan:

   a. Bank-bank akan ikut menaikkan suku bunga pinjaman untuk menjaga stabilitas keuangan.

Sebaliknya, jika BI menurunkan suku bunga acuan:

   b. Bank cenderung menurunkan bunga pinjaman, agar masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah memperoleh pembiayaan.

2. Tingkat Inflasi

   Inflasi menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum.

   a. Jika inflasi tinggi, nilai uang menurun, dan lembaga keuangan akan menaikkan bunga untuk melindungi nilai dana mereka.

   b. Jika inflasi rendah dan stabil, suku bunga cenderung turun karena risiko ekonomi lebih kecil.

3. Permintaan dan Penawaran Dana di Pasar Keuangan

   Suku bunga juga dipengaruhi oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran dana.

   a. Jika banyak pihak membutuhkan pinjaman (permintaan tinggi), maka suku bunga cenderung naik.

   b. Jika banyak dana tersedia di bank (penawaran tinggi), maka suku bunga bisa turun.

4. Risiko Kredit (Credit Risk)

   Bank akan menyesuaikan tingkat bunga berdasarkan tingkat risiko dari calon peminjam.

   a. Jika nasabah dianggap berisiko tinggi gagal bayar (misalnya UKM tanpa jaminan kuat atau catatan keuangan jelas), bunga akan lebih tinggi.

   b. Sebaliknya, nasabah dengan jaminan kuat dan reputasi baik akan memperoleh bunga lebih rendah.

5. Kondisi Ekonomi dan Politik

   Ketidakpastian ekonomi atau politik (misalnya krisis, konflik, atau perubahan kebijakan) dapat meningkatkan risiko investasi. Untuk mengimbangi risiko tersebut, lembaga keuangan biasanya menaikkan suku bunga agar tetap memperoleh keuntungan.

6. Likuiditas atau Ketersediaan Dana di Bank

   Likuiditas menunjukkan seberapa banyak dana yang tersedia di lembaga keuangan untuk disalurkan sebagai kredit.

a. Jika likuiditas tinggi, suku bunga bisa rendah, karena dana melimpah.

b. Jika likuiditas rendah, suku bunga naik, karena dana pinjaman terbatas.

7. Dalam pasar keuangan yang kompetitif, bank atau lembaga keuangan berlomba menarik nasabah dengan menawarkan bunga yang lebih menarik.

a. Persaingan ketat → bunga cenderung turun.

b. Pasar dikuasai sedikit lembaga → bunga bisa lebih tinggi karena pilihan nasabah terbatas.

2.2.7 Indikator Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga dalam penelitian ini diukur melalui beberapa indikator yang merujuk pada penelitian terdahulu. (Pratama, 2019) dan (Eva Utami, 2020) menjelaskan bahwa indikator utama adalah besarnya tingkat suku bunga yang ditetapkan lembaga keuangan, yang memengaruhi minat UKM dalam mengajukan kredit. Selain itu, (Colin dan Sean, 2021) menegaskan pentingnya keterjangkauan suku bunga, yaitu sejauh mana besaran bunga sesuai dengan kemampuan bayar pelaku usaha sehingga tidak membebani arus kas mereka. Stabilitas suku bunga juga menjadi indikator penting, sebagaimana dijelaskan oleh (Widodo 2018), yang menjelaskan bahwa UKM lebih memilih skema kredit dengan bunga yang tidak berubah-ubah karena memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan. Penelitian terdahulu juga menyoroti pentingnya transparansi informasi suku bunga, yaitu kejelasan mengenai perhitungan bunga, biaya tambahan, dan sistem

pembayaran yang memengaruhi tingkat kepercayaan UKM terhadap lembaga keuangan. Selain itu, kesesuaian tingkat bunga dengan risiko kredit turut menjadi indikator yang diperhatikan, di mana UKM menilai apakah bunga yang diberikan lembaga keuangan sudah proporsional dengan kondisi usaha mereka. Seluruh indikator ini mencerminkan bagaimana tingkat suku bunga memengaruhi akses UKM terhadap layanan keuangan formal.

2.2.8 Akses Layanan Keuangan

Akses layanan keuangan merupakan kemampuan pelaku UKM untuk memperoleh dan memanfaatkan berbagai produk keuangan secara efektif, mulai dari tabungan, kredit, hingga layanan digital. Akses layanan keuangan adalah kemampuan individu atau pelaku usaha dalam memperoleh dan memanfaatkan produk layanan keuangan formal seperti kredit, tabungan, asuransi, dan sistem pembayaran, (Bank Indonesia, 2021). Akses keuangan merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pengembangan usaha kecil, (World Bank, 2020). UKM yang memiliki akses luas ke lembaga keuangan lebih mudah memperoleh modal untuk memperluas usaha dan meningkatkan produktivitas.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2020), akses keuangan merupakan kondisi di mana masyarakat atau pelaku usaha dapat menjangkau produk keuangan dengan biaya yang terjangkau, prosedur yang mudah, dan perlindungan yang memadai. Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), akses layanan keuangan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha karena memungkinkan mereka memperoleh modal kerja, investasi, serta fasilitas

transaksi yang lebih efisien dan aman. Akses terhadap pembiayaan eksternal merupakan faktor penting lainnya yang mempengaruhi lintasan pertumbuhan UKM. UKM sering menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan dari sumber-sumber formal seperti bank dan lembaga keuangan karena berbagai faktor seperti persyaratan agunan, suku bunga yang tinggi, dan informasi yang tidak seimbang. Akibatnya, banyak UKM bergantung pada sumber-sumber keuangan informal, yang mungkin mahal dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modal mereka. Meningkatkan akses keuangan melalui mekanisme seperti keuangan mikro, modal ventura, dan program pinjaman yang disponsori pemerintah sangat penting untuk membuka potensi pertumbuhan UKM dan memfasilitasi integrasi mereka ke dalam pasar formal (Amalia Putri et al., 2023; Ferli, 2023; Hamdana et al., 2021)

Akses layanan keuangan memiliki tujuan penting dalam mendukung perkembangan pelaku usaha, khususnya UKM. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan inklusi keuangan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan formal secara setara. Kemudahan akses pembiayaan juga mendorong pertumbuhan ekonomi, karena UKM dapat meningkatkan produktivitas melalui tambahan modal. Selain itu, akses keuangan yang lebih merata mampu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memberikan peluang pendanaan yang sama antara usaha kecil dan usaha besar. Pada akhirnya, layanan keuangan yang mudah dijangkau turut meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha melalui kemudahan memperoleh modal, menabung, serta mengelola risiko secara lebih efektif.

Akses layanan keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Lingkungan regulasi dan kebijakan pemerintah menjadi faktor penting karena aturan yang jelas dan prosedur yang sederhana akan mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh layanan keuangan. Selain itu, ketersediaan jaminan atau agunan turut menentukan apakah UKM dapat memenuhi persyaratan pembiayaan yang ditetapkan lembaga keuangan. Tingkat suku bunga pinjaman juga berpengaruh, karena bunga yang terlalu tinggi dapat menurunkan minat dan kemampuan pelaku usaha untuk mengakses kredit. Di samping itu, literasi keuangan pelaku usaha menjadi faktor penentu kemampuan mereka dalam memahami, memilih, dan memanfaatkan layanan keuangan secara tepat. Faktor lainnya adalah kedekatan geografis dengan lembaga keuangan, karena semakin mudah UKM menjangkau lokasi bank atau lembaga keuangan, semakin besar kemungkinan mereka memanfaatkan layanan tersebut.

2.2.9 Indikator Akses Layana Keuangan

Akses layanan keuangan dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu kemudahan memperoleh layanan, ketersediaan informasi keuangan, kedekatan lokasi layanan, serta kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi. (Eva Utami, 2020) menegaskan bahwa kemudahan prosedur meningkatkan peluang UKM memperoleh pembiayaan, sedangkan (Colin dan Sean 2021) menemukan bahwa keterbatasan informasi menjadi hambatan utama akses kredit. Selain itu, (Putri, 2019) menunjukkan bahwa kedekatan lembaga keuangan mendorong peningkatan akses UKM, dan (Prabowo, 2020)

menambahkan bahwa persyaratan administrasi yang sederhana memperluas kesempatan usaha kecil dalam mendapatkan layanan keuangan.

2.2.10 Usaha Kecil Dan Menengah

Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) merujuk pada ukuran atau dimensi usaha tersebut. Kriteria untuk menentukan skala UKM dapat bervariasi antara negara dan sektor bisnis tertentu. Di Indonesia, skala UKM seringkali diukur berdasarkan jumlah pekerja,omset penjualan tahunan,atau kombinasi keduanya.

Berikut adalah beberapa poin umum terkait dengan skala UKM :

1. Jumlah pekerja
   a. Usaha kecil: biasanya memiliki jumlah pekerja kurang dari 20 orang
   b. Usaha menengah:jumlah pekerja biasa berkisar antara 21 hingga 100 orang
2. Omset penjualan kecil
   a. Usaha kecil: omset penjualan tahunan biasanya dibatasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan misalnya, diindonesia UKM dikelompokan berdasarkan omset penjualan tahunan dengan batas tertentu untuk usaha kecil dan menengah
   b. Usaha menengah:omset penjualan tahunan usaha menengah lebih tinggi di bandingkan dengan usaha kecil.
3. Aset

   Bebrapa negara atau sektor mungkin juga mempertimbangkan nilai aset sebagai salah satu kriteria untuk mengklasifikasikan UKM

4. Mengikuti standar pemerintah

   Banyak negara memiliki definisi resmi dan standar yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengklasifikasi suatu usaha sebagai UKM.pemerintah biasanya menentukan kriteria ini untuk memberikan dukungan dan fasilitas khusus kepada UKM

5. Dinamika bisnis

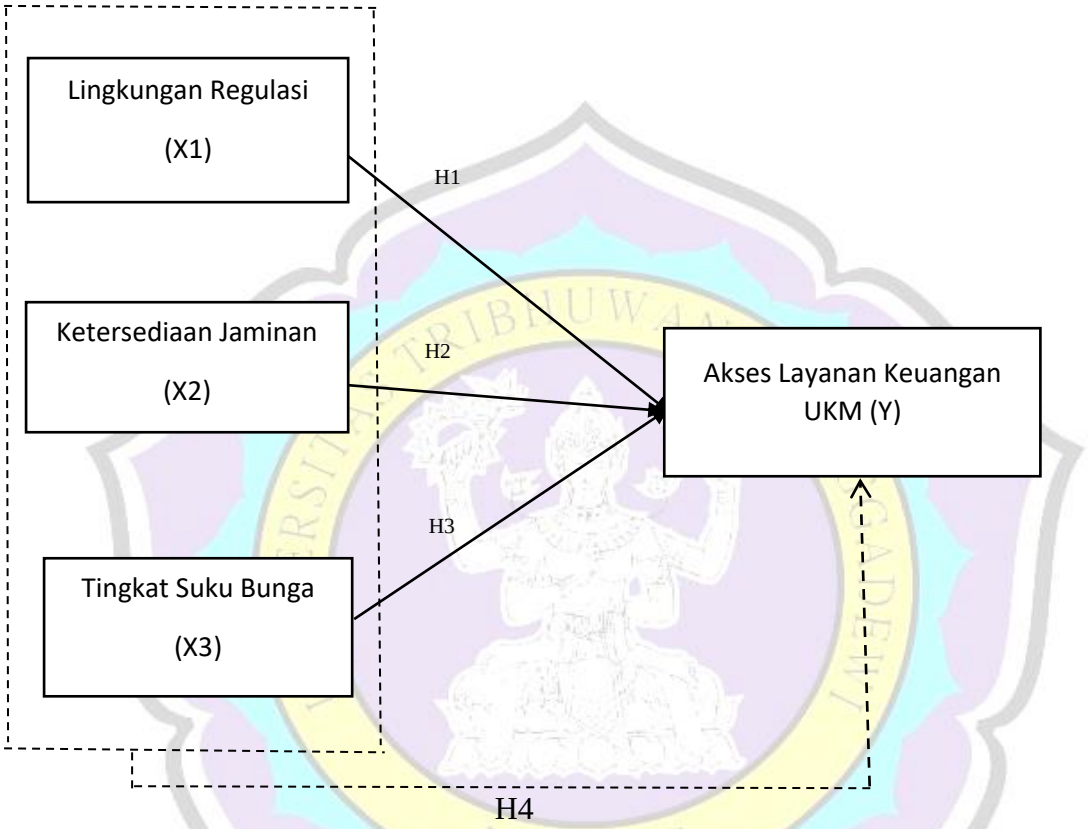
   Selain kriteria kuantitatif,skala UKM juga mencakup aspek dinamika bisnis.UKM cendrung memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar dalam menghadapi perubahan pasar.

2.3. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian ini disusun berdasarkan hubungan antar variabel yang telah dijelaskan pada landasan teori dan penelitian terdahulu. Variabel lingkungan regulasi, ketersediaan jaminan, dan tingkat suku bunga berperan sebagai variabel independen yang diduga memengaruhi akses layanan keuangan sebagai variabel dependen. Secara teoritis, lingkungan regulasi yang jelas dan sederhana akan mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi syarat administrasi untuk memperoleh layanan keuangan. Ketersediaan jaminan berkontribusi pada kelayakan kredit yang dinilai oleh lembaga keuangan, sehingga pelaku usaha dengan agunan memadai cenderung lebih mudah mendapatkan pembiayaan. Sementara itu, tingkat suku bunga menjadi faktor biaya yang dapat meningkatkan atau menurunkan minat dan kemampuan pelaku usaha untuk mengakses layanan keuangan. Oleh karena itu, ketiga variabel

tersebut dianggap memiliki peran penting dalam mempengaruhi akses layanan keuangan bagi pelaku UKM.

Gambar 2.3 Kerangka Konsep



Keterangan :

Pengaruh Secara ⟶ Parsial

Pengaruh Secara ⇢ Simultan

a. Hipotesis 1

Lingkungan regulasi berpengaruh positif terhadap akses layanan keuangan UKM di kota batu.

b. Hipotensis 2

Ketersediaan jaminan berpengaruh positif terhadap akses layanan keuangan di kota batu.

c. Hipotensis 3

Tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap akses layanan keuangan UKM di kota batu.

d. Hipotensis 4

Lingkungan regulasi, ketersediaan jaminan, dan tingkat suku bunga secara simultan berpengaruh positif terhadap akses layanan keuangan UKM di kota batu

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini didasarkan pada teori yang relevan dan temuan penelitian terdahulu mengenai Pengaruh lingkungan regulasi, ketersediaan jaminan, tingginya tingkat suku bunga terhadap akses layanan keuangan ukm. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, hubungan antara variabel, dan kerangka konsep yang telah dipaparkan, maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Lingkungan Regulasi terhadap Akses Layanan Keuangan UKM di kota batu.

Lingkungan regulasi merupakan seperangkat aturan, kebijakan, serta prosedur administratif yang ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan untuk mengatur kegiatan usaha dan pembiayaan. Regulasi yang jelas, sederhana, dan mendukung akan mempermudah pelaku UKM dalam mengakses layanan keuangan. Sebaliknya, regulasi yang rumit, birokrasi yang panjang, dan

persyaratan administratif yang berlebihan dapat menjadi hambatan bagi UKM dalam memperoleh pembiayaan. Lingkungan regulasi yang kondusif berperan dalam memberikan kepastian hukum, efisiensi prosedur, dan kemudahan dalam proses pengajuan kredit. Menurut teori akses keuangan, semakin rendah hambatan regulasi, semakin besar peluang UKM untuk memasuki sistem keuangan formal. Regulasi yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit, karena terdapat pedoman operasional yang jelas terkait kelayakan usaha, tata kelola, dan perlindungan risiko.

Penyederhanaan prosedur perizinan dan transparansi regulasi berpengaruh positif terhadap peningkatan akses pembiayaan UKM. Ketika regulasi lebih sederhana, biaya administrasi menurun dan proses pengajuan kredit menjadi lebih cepat (Pratama 2019). Regulasi yang terlalu ketat, terutama terkait persyaratan dokumen, menjadi hambatan utama UMKM dalam memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin ringan regulasi, semakin tinggi tingkat persetujuan kredit (Lestari 2020). Rahman dan (Setiawan 2021) membuktikan bahwa kebijakan pemerintah mengenai kemudahan pembiayaan UKM (seperti subsidi bunga, penjaminan kredit, dan penyederhanaan prosedur) memberikan dampak positif terhadap akses layanan keuangan, terutama pada UKM yang sebelumnya kesulitan mengakses lembaga keuangan.

Berdasarkan teori dan temuan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa lingkungan regulasi yang kondusif akan meningkatkan akses UKM

terhadap layanan keuangan. Dengan demikian, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Lingkungan regulasi berpengaruh positif terhadap akses layanan keuangan UKM di kota batu.

2.4.2 Pengaruh Ketersediaan Jaminan terhadap Akses Layanan Keuangan UKM dikota Batu.

Ketersediaan jaminan merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan lembaga keuangan dalam memberikan kredit kepada pelaku UKM. Jaminan berfungsi sebagai instrumen penjamin risiko apabila terjadi gagal bayar, sehingga keberadaannya meningkatkan keyakinan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan. Semakin memadai nilai jaminan yang dimiliki UKM, semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan persetujuan kredit. Sebaliknya, keterbatasan jaminan sering menjadi kendala utama bagi UKM untuk mengakses layanan pembiayaan formal. Dalam teori lembaga keuangan, agunan *(collateral)* berfungsi sebagai alat kontrol risiko yang dapat mengurangi kemungkinan kerugian bagi pihak pemberi kredit. Oleh karena itu, UKM yang memiliki aset tetap atau jaminan bernilai tinggi cenderung lebih mudah disetujui dalam proses pembiayaan. Jaminan juga menunjukkan kapasitas peminjam dalam menjaga kewajiban finansial, sehingga meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan.

(Eva Utami 2019) menunjukkan bahwa ketersediaan jaminan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses pembiayaan UKM. UKM yang mampu

menyediakan aset sebagai agunan memiliki probabilitas lebih tinggi diterima dalam pengajuan kredit. (Putra, 2020) menemukan bahwa kualitas dan nilai jaminan menjadi salah satu faktor terpenting bagi lembaga keuangan dalam menilai kelayakan kredit. Semakin tinggi nilai jaminan yang ditawarkan, semakin besar kemungkinan pemberian kredit. (Colin dan Sean, 2021) menyatakan bahwa keterbatasan jaminan merupakan penyebab utama sulitnya UKM mengakses pembiayaan formal. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberadaan agunan mempermudah persetujuan kredit oleh lembaga keuangan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan jaminan yang memadai akan meningkatkan peluang UKM untuk memperoleh pembiayaan.

Dengan demikian, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2: Ketersediaan jaminan berpengaruh positif terhadap akses layanan keuangan UKM di kota batu.

2.4.3 Pengaruh Tingginya Tingkat Suku Bunga terhadap Akses Layanan Keuangan UKM dikota Batu.

Tingkat suku bunga merupakan faktor penting yang menentukan biaya pinjaman bagi pelaku UKM. Suku bunga yang rendah atau kompetitif akan meningkatkan kemampuan UKM dalam mengakses kredit, karena beban pengembalian menjadi lebih ringan. Sebaliknya, suku bunga yang tinggi dapat menurunkan minat UKM untuk meminjam, karena total biaya pinjaman menjadi lebih besar dan berpotensi meningkatkan risiko ketidakmampuan membayar.

Secara teori, tingkat suku bunga memengaruhi permintaan kredit. Ketika suku bunga turun, biaya pinjaman menjadi lebih murah sehingga kebutuhan akan kredit meningkat. Bagi UKM, ketersediaan bunga yang stabil dan terjangkau sangat berpengaruh terhadap keberanian mereka dalam mengakses layanan pembiayaan.

Penurunan suku bunga meningkatkan kemampuan UKM dalam mengakses pembiayaan. (Wibowo, 2021) menemukan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit UKM di Jawa Timur. UKM lebih cenderung mengajukan kredit ketika bunga lebih rendah dan stabil. (Lestari, 2020) menjelaskan bahwa beban bunga yang tinggi menjadi salah satu hambatan terbesar UKM dalam mengakses layanan keuangan formal. Penelitian tersebut menegaskan bahwa suku bunga memainkan peran penting dalam memengaruhi keputusan UKM untuk meminjam.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga yang lebih terjangkau akan meningkatkan akses UKM terhadap layanan keuangan.

Dengan demikian, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3: Tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap akses layanan keuangan UKM di kota batu.

2.4.4 Pengaruh Lingkungan Regulasi, Ketersediaan Jaminan, dan Tingkat Suku Bunga secara Simultan terhadap Akses Layanan Keuangan UKM di kota batu.

Akses layanan keuangan UKM tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor secara parsial, tetapi oleh kombinasi beberapa faktor yang saling berkaitan. Lingkungan regulasi menentukan kemudahan prosedural dan kepastian hukum dalam proses pembiayaan. Ketersediaan jaminan berfungsi sebagai penjamin risiko bagi lembaga keuangan sehingga meningkatkan keyakinan dalam memberikan kredit. Sementara itu, tingkat suku bunga menentukan besar kecilnya beban biaya pinjaman yang harus ditanggung UKM. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama membentuk kondisi yang dapat memperkuat atau melemahkan kemampuan UKM dalam mengakses layanan keuangan formal. Dalam teori akses keuangan, kombinasi faktor regulasi, agunan, dan biaya kredit dipandang sebagai komponen penting yang memengaruhi keputusan lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit serta keputusan UKM dalam mengajukan pembiayaan. Ketika regulasi lebih sederhana, jaminan mencukupi, dan suku bunga kompetitif, maka hambatan akses keuangan akan menurun secara signifikan.

Lingkungan regulasi, jaminan, dan suku bunga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kredit UKM. Ketiga faktor tersebut terbukti bersama-sama mendorong akses pembiayaan (Pratama, 2019). (Eva Utami, 2020) menunjukkan bahwa kombinasi variabel jaminan, suku bunga, dan regulasi secara kolektif memiliki pengaruh besar terhadap tingkat akses UKM terhadap lembaga keuangan formal. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya

pengaruh simultan, bukan hanya parsial. (Wibowo 2021) menyatakan bahwa akses pembiayaan UKM meningkat secara signifikan ketika ketiga faktor, regulasi yang jelas, jaminan yang memadai, dan suku bunga yang terjangkau secara simultan mendukung proses kredit.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa lingkungan regulasi, ketersediaan jaminan, dan tingkat suku bunga memiliki pengaruh penting ketika dilihat secara bersama-sama dalam meningkatkan akses layanan keuangan UKM.

Dengan demikian, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H4: Lingkungan regulasi, ketersediaan jaminan, dan tingginya tingkat suku bunga secara simultan berpengaruh terhadap akses layanan keuangan UKM di kota batu